

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Tujuan Pembangunan itu ialah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan Pembangunan Pertanian ialah untuk meningkatkan produksi melalui berbagai kebijakan dalam upaya mempertahankan swasembada pangan yang telah kita capai. Besarnya pendapatan petani dan nelayan sangat sangat tergantung kepada produksi yang dihasilkan baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. Dengan pendapatan petani dan nelayan yang meningkat akan meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya juga meningkat. Disamping itu pembangunan pertanian juga sekaligus harus dapat memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha bagi anggota masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan (Affandy, 1986).

Salah satu sub sektor yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pembangunan sektor pertanian adalah sub sektor perikanan yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka luas perairan laut Indonesia telah bertambah dari 3,1 juta Km² menjadi 5,8 juta km² . dengan semakin luasnya penguasaan wilayah perairan Indonesia maka potensi perairan yang dikuasai juga bertambah (Baharsjah, 1965).

Sebagaimana yang termaksud dalam petikan beberapa pernyataan yang dituliskan dalam GBHN 1993 – 1998 maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Bahwa pemabgunan disub sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan kualitas Desa Pantai.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan diatas maka diperlukan upaya peningkatan dan diversifikasi produksi ikan.
- c. Bahwa untuk dapat mencapai peningkatan dan diversifikasi produksi ikan, maka diperlukan kegiatan agribisnis perikanan.

Menurut GBHN 1993 – 1998, Agribisnis Perikanan dikembangkan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi, melalui pengembangan serta penerapan teknologi maju dalam berbagai usaha budidaya ikan di daerah pantai, tambak dan air tawar, serta usaha penangkapan ikan didaerah pantai dan daerah lepas pantai. Kegiatan penangkapan ikan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur melalui pola penguasaan yang menjamin penerimaan yang sebesar-besarnya bagi negara. Perhatian khusus perlu diberikan pada koperasi bersamaan, dengan usaha perlindungan dan pengembanga perikanan rakyat serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai.

Menurut Mubyarto, 1984, faktor objektif penyebab kemiskinan adalah hal-hal secaranyata mengakibatkan munculnya kemiskinan yaitu :

1. Sempitnya pemilikan lahan pertanian.
2. Berlangsungnya sistem penguasaan tanah yang kurang seimbang.